

**PERANAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP)
PANCER JAYA DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Social
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Oleh

JEFRIZAL
10975008373



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK
PERANAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP)
PANCER JAYA DESA PANTAI CERMIN KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR

Oleh :
JEFRIZAL
NIM. 10975008373

Penelitian ini dilakukan di Kantor UED-SP PANCER JAYA Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah Peranan yang diterapkan oleh pengelola UED-SP PANCER JAYA Pada Program Pemberdayaan Desa UED-SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab. Kampar, kemudian tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimanakah Peranan yang diterapkan oleh pengelolah UED-SP PANCER JAYA pada Program Pemberdayaan Desa UED- SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab. Kampar

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, queisioner, dan wawancara. Kemudian teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata (Anas Sudjono 2004). Dalam penelitian ini, peranan yang diterapkan oleh pengelola UED-SP Pancer Jaya Pada Program Pemberdayaan Desa UED- SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab. Kampar dengan merumuskan tujuan UED-SP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu :

- 1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa*
- 2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah*
- 3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja*
- 4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Adapun skripsi yang mengambil judul **“PERANAN USAHA EKONOMI DESA SIMPAN-PINJAM (UED-SP) PANCER JAYA DESA PANTAI CERMIN KECAMATAN TAPUNG KABUPATEN KAMPAR ”** diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Munaqasah pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan, tentunya dengan maksud guna penyempurnaan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setulus hati sepenuh jiwa, penulis ucapkan kepada:

1. ALLAH SWT karena dengan ridho Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayahanda Basri Hs dan Ibunda tercinta Nurkhusaimah, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moril dan materil serta dukungan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Mudah-mudahan perjuangan bapak dan ibu mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T.
3. Bapak Prof.DR.H.M.Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau
4. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Afrizal, S,sos.M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara dan Bapak Rusdi S.Sos selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

6. Ibu Ratna Dewi S.sos M.si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu serta pikiran dalam membimbing penulis guna penyelesaian skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Bapak Rodi Wahyudi,S.sos,M.SOC.SC yang selalu memberikan motivasi dan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis
8. Terimakasih kepada ibu Devi Deswimar,S.sos, M.Si yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
9. Buat kakak tercinta Asri marni, dan kedua adik saya Nuratika,Rizal Agusti yang selalu mendoakan penulis
10. Terima kasih buat Fitri Yanna,Amd,Keb yang selalu memberikan semangat dan doa buat penulis
11. Thanks to teman-teman angkatan 2009 yang selalu memberikan motivasi buat penulis
12. Terima kasih Buat teman – teman seperjuangan,juga ucapan terimakasih kepada group Lebay Comunity

Akhirnya atas segala bantuan semua pihak, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, semoga semua ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiin...

Pekanbaru, 22 Oktober 2013

Penulis

Jefrizal

NIM. 10975008373

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakangMasalah.....	1
1.2 PerumusanMasalah.....	11
1.3 TujuanPenelitian.....	11
1.4 MafaatPenelitian.....	12
1.5 SistematikaPenulisan.....	12

BAB II : TELAAH PUSTAKA

2.1 DefinisiTeoriPeran.....	14
2.2PengertianPeranan.....	16
2.3Pandangan Islam terhadapperananan.....	21
2.4 PengertianKebijakan.....	24
2.5 Teoriimplementasikebijakan.....	26
2.6 Pengertian Pembangunan.....	28
2.7PengertianPemberdayaan.....	30
2.8 Program PemberdayaanDesa (PPD).....	34
2.9 UED-SP PANCER JAYA.....	44
2.10Keanggotaan UED-SP PANCER JAYA.....	44
2.11 OrganisasidanPengelolaan.....	45
2.12 Kegiatan UED-SP PANCER JAYA.....	46
2.13 Pendapatan UED-SP PANCER JAYA.....	47
2.14 DefinisiKonsep.....	47
2.15 KonsepOperasional.....	48
2.16 VariabelPenelitian.....	48

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

3.1 LokasiPenelitian.....	50
3.2 JenisdanSumber Data.....	50
3.3 PopulasidanSampel.....	51
3.4 MetodePengumpulan Data.....	52
3.5 Analisis Data.....	53

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kantor UED-SP Pancer Jaya.....	54
4.2 Struktur Organisasi UED-SP Pancer Jaya.....	54
4.3 Tugas Dan Tanggung Jawab Pengelola UED-SP.....	55

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden.....	59
5.2 Tujuan UED-SP Pancer Jaya.....	61

BAB VI: PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	70
6.2 Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara. Penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia, sebagai negara kesatuan Provinsi Riau yang merupakan bagian dari NKRI tidak luput dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Dimana masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam garis kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus terus menggalakan program yang biasa mengentaskan kemiskinan, dengan Pelaksanaan Program Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya yang merupakan percepatan penyelesaian rendahnya kesejahteraan masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dalam pasal 154 yang berbunyi, tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yang berpedoman pada Perundang-Undangan. Dalam

Agenda Nasional (Propenas) dan Keputusan Gubernur Provinsi Riau Nomor 592/IX/2004 dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau melalui Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/132/III/2005 Tanggal 31 Maret 2005 mengeluarkan kebijakan untuk Pelaksanaan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) yang dituangkan secara jelas dalam pedoman umum dan petunjuk teknis serta menunjuk lokasi penerima bantuan dana usaha desa/kelurahan. Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah program yang bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan. Penanggulangan dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Adapun jenis kegiatan PPD pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya pemerintah Provinsi Riau untuk menanggulangi masalah kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur (K2I). Sedangkan menurut peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Dan Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau, seluruh proses kegiatan PPD pada hakikatnya memiliki 3 dimensi, yaitu:

1. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan kegiatan pembangunan, melaksanakan secara terbuka dan penuh tanggung jawab.

2. Memberikan dukungan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri.
3. Menyediakan Dana Usaha Desa/Kelurahan untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat Desa/Kelurahan. Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) implementasinya terdiri dari dua jenis kegiatan yaitu:
 1. Kegiatan regular perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan melalui sektoral.
 2. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui Dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola dalam Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam/UEK-SP (PERGUB Riau No. 15 Tahun 2006).

Adapun tujuan Program pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) di Provinsi Riau secara khusus adalah:

1. Mendorong perekonomian masyarakat desa/kelurahan
2. Meningkatkan dorongan berusaha bagi anggota masyarakat desa /kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sektoral informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir.
5. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan.

6. Meningkatkan kebiasaan gotong royong dan gemar menabung secara tertib.
7. Meningkatkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa/Kelurahan.
8. Memenuhi kebutuhan sarana/prasana yang dibutuhkan oleh masyarakat desa/kelurahan (BPPM,2005:1)

Sedangkan misi yang ingin dicapai dari kegiatan Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) adalah:

1. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan.
2. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa.
3. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif.
4. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa/Kelurahan (PERGUB Riau No.15 Tahun 2006).

Dimana sumber dana terdiri dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota. Sehubungan Program pemberdayaan desa/Kelurahan tersebut, Desa Pantaicermin kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan salah satu lokasi penerimaan bantuan Dana Usaha Desa (UED). Program Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) ini merupakan salah satu program pemerintah yang mengurangi dan mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui pemberian dana pinjaman modal bagi pengusaha menengah kebawah. Untuk pelaksanaan kegiatan modal usaha Desa/Kelurahan Pemerintah membentuk satu lembaga khusus yang disebut dengan usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

Pembentukan pengelola dilakukan melalui forum resmi musyawarah seluruh elemen dan peran serta kelurahan yang dipimpin oleh kepala Desa yang difasilitasi oleh konsultan pendamping yang selanjutnya pengelola UED-SP harus mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota. Berdasarkan keputusan Desa nomor.141/KPTS/08/km/2009 tanggal 29 juni 2009. Melalui rapat Kelurahan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) "PANCER JAYA" yang berfungsi sebagai Lembaga keuangan Kelurahan melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana usaha kelurahan dari penyaluran kredit tersebut Dana ini berasal dari dana shering Pemerintah kabupaten/Kota Kepada desa/Kelurahan. Sebagai mana tertuang dalam surat Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SK Tentang Pedoman Alokasi Dana sharing dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa/Kelurahan tanggal 22 Maret 2005.

Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan salah satu lokasi penerima Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan yang menerima bantuan Dana Usaha Desa/Kelurahan. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pada tanggal 29 juni 2009 dibentuk suatu Lembaga Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) berdasarkan petunjuk teknis Program oleh BPPM Provinsi Riau di Desa Pantaicermin. Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) yang berada di Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar merupakan lembaga yang mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan di tempat bersangkutan. Bantuan dana yang

dikucurkan oleh Pemerintah kepada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) PANCER JAYA sebanyak Rp.500.000.000,- dan sudah tersalurkan semuanya. Jumlah dana yang diterima masing-masing pemohon/warga sesuai ketentuan dan kelayakan anggunan, artinya anggunan menentukan jumlah dana yang bias dipinjamkan. Besar dana yang sudah dipinjamkan berkisar antara Rp.2.000.000 s/d 20.000.000 perorangan dengan jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 18 bulan sebagai mana di amanatkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2006. Bentuk riil dari program ini adalah untuk melayani masyarakat pengusaha kecil yang ingin mendapatkan pinjaman modal dari desa yang ada di kecamatan tapung.

Dengan adanya Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP) sangatlah membantu Penanggulangan perekonomian masyarakat Desa Pantaicermin. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menampung semua keperluan usaha masyarakat dan memberikan pinjaman uang kepada masyarakat untuk membuat usaha dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Dan adapun Tujuan daripada UED-SP ini adalah :

1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja
4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

Sasaran UED-SP ini adalah Masyarakat desa yang berpenghasilan rendah yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Dengan adanya UED-SP PANCER JAYA di Desa Pantaicermin ini sangatlah efektif perkembangannya setiap tahunnya, dan dapat dilihat perkembangan UED-SP PANCER JAYA sampai tahun 2013 berikut laporan rekapitulasinya :

Table 1.1

Rekapitulasi UED-SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab.

Kampar

TAHUN	PERGULIRAN	PENMANFAAT	JUMLAH PENCAIRAN
2010	Modal Perguliran	90	757,000,000
2011	Modal Perguliran	71	677,000,000
2012	Modal Perguliran	68	603,000,000
Modal			500,000,000
<i>Modal seluruh pemanfaat perguliran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012</i>			1,037,000,000

Sumber : Kantor UED-SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab.

Kampar

Dari table diatas menunjukan bahwa perkembangan perguliran yang semakin signifikan mulai dari tahun 2010 UED-SP PANCER JAYA dikelola hingga sampai tahun 2012. Mulai dibentuknya UED-SP PANCER JAYA ini hanya bermodalkan

dari Dana Usaha Desa Melalui bantuan Program Pemberdayaan Desa (Sharing Budget APBD Tk I Propinsi Riau Rp.500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dan digulirkan sampai tahun 2012 menjadi Rp2,037,000,000,- (dua miliar tiga puluh tujuh juta rupiah).

Dan berikut table perbandingan UED-SP yang ada di kecamatan tapung kabupaten kampar adalah sebagai berikut :

Table 1.2

Rekapitulasi UED-SP GEMAH RIPAHA Desa Tanjung Sawit Kec.Tapung Kab.

Kampar

TUHAN	RGULIRAN	MANFAAT	JUMLAH PENCAIR AN
2010	tal Perguliran	60	557,000,000
2011	tal Perguliran	67	643,000,000
2012	tal Perguliran	51	553,000,000
Modal			500,000,000
<i>tal seluruh pemanfaat perguliran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012</i>			1,753,000,000

Sumber : Kantor UED-SP GIMAH RIPAHA Desa Tanjung Sawit Kec.Tapung Kab.

Kampar

Dapat dilihat perbandingan UED-SP GEMAH RIPAHA Desa Tanjung Sawit Kec. Tapung Kab. Kampar Dengan UED-SP PANCER JAYA lebih signifikan dana

pergulirannya dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mencapai Rp2,037,000,000,- (dua miliar tiga puluh tujuh juta rupiah), sedangkan perguliran UED-SP GEMAH RIPAHA dari tahun 2010 sampai 2012 hanya mencapai Rp 1,753,000,000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga rupiah)

Table 1.3

Rekapitulasi UED-SP INDRA PURI SEJAHTERA Desa Indrapuri Kec.Tapung

Kab. Kampar

TAHUN	PERGULIRAN	PENYERANG	JUMLAH PENCAIRAN
2010	Modal Perguliran	63	657,000,000
2011	Modal Perguliran	59	593,000,000
2012	Modal Perguliran	67	659,000,000
Modal			500,000,000
<i>Modal seluruh pemanfaat perguliran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012</i>			1,909,000,000

Sumber : Kantor UED-SP INDRA PURI SEJAHTERA Desa IndrapuriKec.Tapung

Kab. Kampar

Dapat dilihat perbandingan UED-SP INDRAPURI SEJAHTERA Desa Indrapuri Kec. Tapung Kab. Kampar Dengan UED-SP PANCER JAYA lebih signifikan dana pergulirannya dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mencapai

Rp2,037,000,000,- (dua miliar tiga puluh tujuh juta rupiah), sedangkan perguliran UED-SP INDRAPURI SEJAHTERA dari tahun 2010 sampai 2012 hanya mencapai Rp 1,909,000,000,- (satu miliar sembilan ratus Sembilan juta rupiah)

Table 1.4

**Rekapitulasi UED-SP KELUBI BERTUAH Desa Bencah Kelubi Kec.Tapung
Kab. Kampar**

TAHUN	PERGULIRAN	MANFAAT	JUMLAH PENCAIRAN
2011	Modal Perguliran	85	814,000,000
2012	Modal Perguliran	49	579,000,000
Modal			500,000,000
<i>Modal seluruh peminfaat perguliran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012</i>			1,393,000,000

Sumber : Kantor UED-SP KELUBI BERTUAH Desa Bencah KelubiKec.Tapung Kab. Kampar

Dapat dilihat perbandingan UED-SP KELUBI BERTUAH Desa Bencahkelubi Kec. Tapung Kab. Kampar Dengan UED-SP PANCER JAYA lebih signifikan dana pergulirannya dari tahun 2010 sampai tahun 2012 mencapai Rp2,037,000,000,- (dua miliar tiga puluh tujuh juta rupiah), sedangkan perguliran UED-SP KELUBI BERTUAH dari tahun 2011 sampai 2012 hanya mencapai Rp 1,393,000,000,- (satu miliar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta rupiah)

Dengan demikian perbandingan UED-SP dari table diatas masih kurangnya perkembangan dibandingkan dengan UED-SP PANCER JAYA diDesa Pantaicermin Kecamatan tapung Kabupaten Kampar. Maka dengan perkembangan yang begitu signifikan oleh UED-SP PANCER JAYA ini maka peneliti tertarik dengan mengangkat judul dengan **PERANAN USAHA EKONOMI DESA – SIMPAN PINJAM (UED-SP) PANCER JAYA DESA PANTAICERMIN KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan tentang Analisis strategi program pemberdayaan Desa UED-SP Pancer Jaya Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab. Kampar maka dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu :

Bagaimanakah Peranan yang diterapkan oleh pengelola UED-SP PANCER JAYA Pada Program Pemberdayaan Desa UED- SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab. Kampar?

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna diolah,dianalisi dan diimplementasikan yang pada akhirnya akan digunakan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang sarjana pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu sosial Universitas Sultan Syarif kasim Riau

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui Bagaimanakah Peranan yang diterapkan oleh pengelola UED-SP PANCER JAYA pada Program Pemberdayaan Desa UED- SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec.Tapung Kab. Kampar?

1.4 Manfaat /Kegunaan Penelitian

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S-1) pada fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska Riau
2. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan
3. Sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan masalah peneliti yang sama

1.5 Sitematika Penulisan

Dalam mendapatkan gambaran umum yang sitematis, maka sitematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II : Telaah Pustaka

Sedangkan isi bab ini Telaah Pustaka yang merupakan landasan teori yang menyangkut revisi-revisi dan buku dengan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu : Hipotesa dan Variabel Penelitian.

BAB III : Metodologi Penelitian

Sedangkan di bab ini berisi Lokasi Penelitian, Jenis pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Teknik pengukuran dan Analisis Data.

BAB IV : Gambaran Umum

Dalam bab ini menguraikan sejarah dari Desa Pantaicermin kec tapung kab kampar, penduduk, sosial, geografis dan monografis keberadaan Kantor UED-SP PANCER JAYA

BAB V : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian.

BAB VI : Kesimpulan Dan Saran

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Defenisi Teori Peran

Teori peran (role theory) mendefinisikan “peran” atau “role” sebagai “the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries” (Banton, 1965; Katz &Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit”.

Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau role perception (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Ditinjau dari Perilaku Organisasi, peran ini merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi, selain norma dan budaya organisasi. Di sini secara umum 'peran' dapat didefinisikan sebagai “expectations about appropriate behavior in a job position (leader, subordinate)”. Ada dua jenis perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan, yaitu (1) role perception: yaitu persepsi seseorang mengenai cara orang itu diharapkan berperilaku; atau dengan kata lain adalah pemahaman atau kesadaran mengenai pola perilaku atau fungsi yang diharapkan dari orang tersebut, dan (2) role expectation: yaitu cara orang lain menerima perilaku seseorang dalam situasi tertentu. Dengan peran yang dimainkan seseorang dalam organisasi, akan terbentuk suatu komponen penting dalam hal identitas dan kemampuan orang itu untuk bekerja. Dalam hal ini, suatu organisasi harus memastikan bahwa peran-peran tersebut telah didefinisikan dengan jelas.

Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (role clarity dan role ambiguity)

4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (jobs) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

2.2 Pengertian Peranan

Peranan menurut Soekanto (2001:268) adalah : “Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan”.

Menurut Soekanto (2001:269) mencakup sedikit tiga pengertian:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial kemasyarakatan.

Poerwadarminta (2003:135) memberikan definisi bahwa peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).

Mengenai cara pelaksanaan peranan pemerintah, Awaludin dalam buku Tjokroamidjoyo (2005:18) mengklasifikasikan sebagai berikut :

1. Fungsi pengaturan dalam hal ini di subklasifikasikan sebagai berikut yaitu penentuan kebijaksanaan, pemberian pengarahan dan bimbingan, peraturan melalui perijinan, pengawasan produk dan fungsi-fungsi ini adalah peraturan.
2. Pemilikan sendiri dari usaha-usaha tertentu yang penyelenggaraannya dapat diselenggarakan sendiri atau swasta.
3. Penyelenggaraan sendiri dari berbagai kegiatan tertentu.

Menurut Kansil dan Cristine (2003:190) Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi usaha yang dilakukan bagi masyarakat dan aparatur pemerintahan untuk mewujudkan kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan.

Peranan (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.(Soekanto, 2009:212-213).

Levinson dalam Soekanto (2009:213) mengatakan peranan mencakup tiga hal, antara lain: Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan

oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus.

Wirutomo (1981 : 99 – 101) mengemukakan pendapat David Berry bahwa dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaan, seseorang diharapkan menjalankan kewajiban-kewajibannya yang berhubungan dengan peranan yang dipegangnya. Peranan didefinisikan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati kedudukan social tertentu. Peranan ditentukan oleh norma-norma dalam masyarakat, maksudnya kita diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan masyarakat di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga dan di dalam peranan-peranan yang lain.

Selanjutnya dikatakan bahwa di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu: pertama, harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan kedua harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-

kewajibannya. Dalam pandangan David Berry, peranan-peranan dapat dilihat sebagai bagian dari struktur masyarakat sehingga struktur masyarakat dapat dilihat sebagai pola-pola peranan yang saling berhubungan.

"Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan yang kebetulan di pegang aktor politik. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga berperilaku tertentu pula. Harapan ataupun dugaan itulah yang membentuk peranan" (Mas'oed, 1984: 45).

Konsep peranan ini pada dasarnya berhubungan dan harus dibedakan dengan konsep posisi sosial. Posisi ini merupakan elemen organisasi, letak dalam ruang sosial, kategori keanggotaan organisasi. Sedangkan peranan adalah aspek fisiologis organisasi yang meliputi fungsi, adaptasi, dan proses. Peranan juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, larangan, tanggung jawab) dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi. "Peranan tersebut selain ditentukan oleh pelaku peran tersebut juga ditentukan oleh harapan pihak lain, termasuk juga kemampuan, keahlian, serta kepekaan pelaku peran tersebut terhadap tuntutan dan situasi yang mendorong dijalankannya peranan. Peranan juga bersifat dinamis, di mana dia akan

menyesuaikan diri terhadap kedudukan yang lebih banyak agar kedudukannya dapat diakui oleh masyarakat” (Soekanto, 1981: 221).

Peranan dapat diartikan sebagai orientasi atau konsepsi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Dengan peranan tersebut, sang pelaku peran baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai dengan harapan orang atau lingkungannya. Dalam hal ini peranan menjalankan konsep melayani untuk menghubungkan harapan-harapan yang terpola dari orang lain atau lingkungan dengan hubungan dan pola yang menyusun struktur sosial. “Peranan juga dapat diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab, dan lainnya), di mana di dalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan, membimbing, dan mendukung fungsinya dalam organisasi” (Coser & Rosenberg, 1976: 232-255; 294).

Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut” (Banyu dan Yani, 2005: 31).

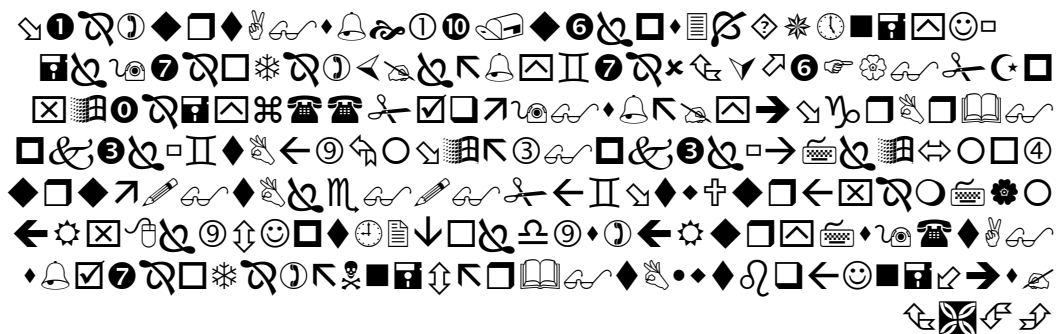
Dari pengertian-pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewajiban terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi. Sebuah

pemerintahan yang begalan dan berkembang tidak terlepas dari pembuatan kebijakan sebagai awal dari arah tujuan pembangunan.

Dari pengertian tersebut maka peranan mengandung maksud sesuatu yang menjadi tugas, fungsi dan kewenangan terhadap sesuatu hal atau kejadian yang intinya berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam suatu organisasi.

2.3 Pandangan Menurut Islam Terhadap Peranan

Manusia mempunyai peran penting di muka bumi ini. Kondisi baik-buruk kehidupan di dunia sangat ditentukan oleh konsistensi manusia dalam melakukan aktivitas baik positif maupun negatif. Dalam hal ini, manusia merupakan faktor penting bagi terciptanya keseimbangan dunia. Sebagaimana Allah berfirman, Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,



Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." ". (QS. Al-Baqarah 2:30)*

Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) semuanya

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ
نُحْمَاصِدِّقِينَ

Artinya: *Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"*(QS. Al-Baqarah:31).

Yang dimaksud khalifah dalam ayat tersebut adalah manusia. Sedangkan kata asma (nama) dalam ayat berikutnya adalah nilai-nilai Allah SWT yang berbentuk makhluk ciptaan selain manusia. Manusia di muka bumi sebagai manifestasi wujud Allah. Oleh karena itu, manusia berkewajiban menjaga dan mengembangkan asma atau nilai-nilai-Nya.

Khalifah adalah pengganti Allah di muka bumi untuk mengetahui ciptaan-ciptaan-Nya; jagat raya dan kekayaan alam ini seperti hutan, sungai, tanah, batu-batuan, gunung, bukit dan tumbuh-tumbuhan.

Dalam surat Al-Hijr ayat 19-20, Allah menegaskan salah satu hubungan kita dengan alam,yang artinya:“Dan Kami telah hamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.

Dan Kami telah jadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rizki kepadanya.”Seperti disebutkan di atas, alam jagat raya beserta isinya merupakan

asma, nilai dan ayat-ayat kauniyah-Nya. Salah satu bentuk penghambaan manusia terhadap penciptanya dengan menyukuri, mengoptimalkan kemampuan dalam melestarikan, mengembangkan dan mencegah sedini mungkin berbagai bentuk mafsadat (kerusakan) terhadap alam semesta. Mashlahat (kebaikan/ kesejahteraan) merupakan suatu tujuan bagi peran khalifah di muka bumi. Segala sesuatu yang terkait dengan kebaikan, kemakmuran dan kesejahteraan manusia di muka bumi menjadi kewajiban guna menjadi khalifah yang baik.

Peran manusia sebagai khalifah telah jelas ditegaskan Allah sebagai mandataris di muka bumi. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia sebagai khalifah adalah sebagai penegak tauhid, keadilan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia akhirat. Pencapaian ketenangan batin dan kesejahteraan lahir di dunia dituntut dari Adam beserta anak cucunya.

Usaha-usaha yang baik harus dilakukan agar tercapainya tujuan tersebut. Anak cucu adam secara alami akan terdorong untuk mewujudkannya sekaligus menyediakan sarana dan mekanisme pencapaian tujuan tersebut.

Dalam merelisasikan peran tersebut, Islam menganjurkan peran aktif semua pihak karena kegiatan yang beragam dan disesuaikan dengan kondisi dan sasaran yang dicapai. Sayyid Quthb, dikutip oleh Quraish Shihab, menyatakan bahwa “cita-cita sosial Islam (kesejahteraan sosial yang diperjuangkannya), bukan hanya berbentuk finansial belaka tetapi dalam berbagai bentuk lain juga.

Usaha dapat dilakukan secara beragam seperti zakat, infak dan shadaqoh adalah sebagaian cara dari banyak usaha yang dianjurkan dalam Islam.”Terlebih,

peran khalifah dalam upaya mewujudkan cita-cita, dalam perjuangannya harus menambahkan bobot aspek akidah dan etika dalam diri pemeluknya. Perjuangan dimulai dari tiap individu dengan pendidikan kejiwaan lalu berlanjut ke tingkat keluarga dan masyarakat sehingga mewujudkan kesejahteraan untuk semuanya.

Menurut Quraish Shihab, salah satu usaha untuk itu adalah

1. Meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam mengembangkan swadaya masyarakat,
2. Membuka peluang kesempatan kerja dan keterampilan,
3. Memperkuat kapasitas keuangan masyarakat miskin.

Oleh karena itu peranan yang dinamis-positif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban manusia karena perubahan kecil apapun atau ide dan cita-cita tidak akan terwujud tanpa usaha.

2.4 Pengertian Kebijakan

Kebijakan sebagai salah satu instrument dalam sebuah pemerintah menjadi penting untuk dibicarakan karena dengan mengetahui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita dapat mengetahui kinerja pemerintah. Banyak sekali definisi tentang kebijakan itu sendiri yang dikemukakan oleh para ahli antara lain: menurut Tankilisan (2003:3), kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Menurut Suharto (2008:3), kebijakan (*policy*) adalah sebuah instrument pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia demi kepentingan public, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat, atau warga Negara. Kebijakan publik adalah suatu keputusan atau seperangkat keputusan untuk menghadapi situasi atau permasalahan yang mengandung nilai tertentu, memuat ketentuan tentang, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya. Menghadapi masalah mengandung arti mengusahakan atau mengadakan perbaikan karena ada suatu keadaan yang tidak diharapkan (misalnya kemiskinan) atau kejadian yang bersifat mengganggu.

Sedangkan menurut Nugroho (2008:85) bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk meralisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan public adalah strategi untuk menganatrakan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa trasnsisis, untuk menuju pada mayarakat yang dicita-citakan.

Dari beberapa pengertian dan pendapat para alhi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dibuat pemrintah untuk melakukan dan tidak melakukan dan di implementsaikan oleh badan berwenang untuk mengatasi masalah dunia nyata yang terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang berorientasi pada tujuan Negara. Kebijakan biasanya merupakan

tindakan untuk memecahkan masalah sosial sehingga tercapainya kesejahteraan sosial. Kebijakan yang dibuat pada umumnya berupa Peraturan Perundang-Undangan yang berbentuk implementasi program kebijakan untuk mengatur sesuatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Perumusan kebijakan pada hakekatnya merupakan proses terus-menerus yang tidak henti. Karenanya, tidak mengherankan jika proses perumusan kebijakan sering disebut sebagai lingkaran kebijakan yang berputar terus menerus. Secara formal, evaluasi merupakan tahap akhir “akhir” dari sebuah proses pembuatan kebijakan. Tidak jauh beda dengan konsep kebijakan publik dan konsep implementasi kebijakan publik, evaluasi juga mempunyai beberapa pengertian yang diberikan para pakar,

Menurut Stuart S. Nagel dalam Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, M.Si (2003:3) definisi analisis kebijakan adalah penentuan alternative terbaik dari kebijakan publik yang mampu memberikan jalan keluar dari berbagai macam alternative kebijakan publik dan pemerintahan dan yang akan paling banyak mencapai seperangkat tujuan didalam hal hubungan antara kebijakan dan tujuan.

2.5 Teori Teori George C. Edwards III (2004) (Implementasi Kebijakan)

Dalam pandangan Edwards III, Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni : Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apa bila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat terwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif . tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan , maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di Negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai korupsi yang muncul dinegara-negara didunia ketiga, seperti

Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adanya prosedur operasi yang Standard operating procedures (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, ini pada gilirannya menyebabkan aktifitas organisasi tidak fleksibel.

2.6 Pengertian Pembangunan

Berbagai pengertian tentang pembangunan telah dikemukakan oleh pakar ekonomi, politik, maupun pakar sosial. Pengertian pembangunan harus dilihat secara dinamis dan tidak sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang senantiasa bergerak maju tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi bukan hanya dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Hakekat dari suatu pembangunan adalah perubahan secara terus-menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah tujuan yang diinginkan.

Proses dimulainya pembangunan dengan berpijak pada pembangunan masyarakat, diharapkan akan dapat memacu demokratisasi masyarakat dalam proses pembangunan itu sendiri. Berikut beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang arti pembangunan, antara lain :

Ginanjari Kartasasmita secara sederhana mengartikan pembangunan sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Sondang P Siagian mendefinisikan pembangunan sebagai : “pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Wrihatnolo pembangunan diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Drs A Surjadi dalam bukunya “Pembangunan Masyarakat Desa” mengemukakan arti Pembangunan adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik dari seluruh masyarakat dengan demokratisasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif ini tidak datang, maka diperlukan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorongnya keluar.

Caralic Bryant dan Louise White (dalam Talizidduhu, 1987: 16) mengemukakan, ” pembangunan ialah upaya untuk meningkatkan kemampuan

manusia untuk mempengaruhi masa depan”. Lebih lanjut Talizidduhu berpendapat ada lima implikasi utama dari pendefinisian pembangunan tersebut, yaitu :

1. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia baik individu maupun kelompok.
2. Pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan.
3. Pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya.
4. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri.
5. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan dengan pihak lain dan menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.

Walaupun pengertian pembangunan cukup beragam, namun dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang mencakup pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan kelembagaan, dan peningkatan sumber daya.

2.7 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati dirinya, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk

bertahan dan mengembangkan diri secara sendiri (PERGUB Riau No. 15 Tahun 2006: kebijakan Umum).

Menurut Suharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang telah mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai kelompok yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat jadi lebih berdaya dan berkemampuan sehingga mereka dapat mewujudkan potensi kemampuan yang mereka miliki. Dalam proses pemberdayaan ada yang disebut subjek dan objek. Subjek adalah orang atau kelompok yang memberdayakan, sedangkan objek adalah orang atau kelompok yang diberdayakan.

Ken Blancard (2002 : 10) mengemukakan pemberdayaan yaitu kemampuan manusia (birokrat) yang harus dimanfaatkan, agar organisasi (birokrasi pemerintah) dapat bertahan dan maju dalam dunia yang semakin kompleks dan dinamis. Pemberdayaan akan memberikan keuntungan kepada masing-masing individu yang daya guna dalam keterlibatan mereka secara langsung akan dapat terwujud dalam peningkatan proses dan sistem yang ada di lingkungannya secara berkelanjutan.

Selanjutnya Ken Blancard mengemukakan bahwa pemberdayaan merupakan konsep yang sulit dalam implementasinya. Terlalu banyak pimpinan institusi yang berpikir bahwa perjalanan menuju pemberdayaan adalah cepat dan mudah. Semua

yang harus dilakukan oleh pihak inovator adalah memberikan dorongan atau semangat, anggota kelompok atau masyarakat akan mewujudkannya.

Chambers (1983: 42-44) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yakni bersifat *“peoplecentered, participatory, empowering, and sustainable”* Pemberdayaan masyarakat dimengerti sebagai konsep yang lebih luas daripada hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

Pemberdayaan masyarakat lebih diartikan sebagai upaya menjadikan manusia sebagai sumber, pelaku dan yang menikmati hasil pembangunan, pemberdayaan masyarakat diupayakan melalui pembangunan ekonomi rakyat (Sumodiningrat, 1996:49-63).

Selanjutnya Sumodiningrat (1998:5-6) mengatakan, bahwa upaya pemberdayaan masyarakat sebagaimana tersebut diatas, paling tidak harus mencakup lima hal pokok yaitu :

1. Bantuan Dana sebagai modal usaha
2. Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan social ekonomi rakyat.
3. Penyediaan sarana untuk mempelancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat.
4. Pelatihan bagi aparat dan masyarakat.
5. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat.

Setiap bantuan yang diberikan kepada masyarakat suatu saat harus digantikan dengan tabungan yang dihimpun dari surplus usaha.

Rubins (dalam I nyoman sumaryadi 2005) pemberdayaan masyarakat memiliki 5 prinsip dasar yaitu :

1. Untuk mempertahankan eksistensi, pemberdayaan masyarakat memerlukan break-even dalam setiap kegiatan yang dikelola.
2. Konsep pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.
3. Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk didalamnya kegiatan pengembangan usaha merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan
4. Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan harus dapat memaksimalkan sumber daya khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah, swasta, maupun sosial.
5. Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

Menurut Craig dan Mayo, (1995:34) Pemberdayaan merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini diberbagai negara. Kemiskinan yang terus melanda umat manusia akibat resesi internasional yang terus bergulir, agen-agen nasional, internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana

percepatan proses pembangunan.karena itu,perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali proses pemberdayaan masyarakat.

2.8 Program Pemberdayaan Desa (PPD)

Program Pemberdayaan Desa adalah satu bentuk program penanggulangan kemiskinan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat yang merupakan kewajiban pemerintah sesuai agenda utama Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas), serta dalam Keputusan Gubernur Riau Nomor 592/IX/2004.

Sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, maka PPD lebih diarahkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, tidak saja dalam hal pengendalian dan pembinaan, tetapi juga dalam hal pembiayaan program. Karena itu komitmen dari DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam pemberian dukungan dan pembiayaan PPD.

Dalam jangka panjang diharapkan prinsip-prinsip dan mekanisme PPD diterapkan dan diadopsi untuk program-program pembangunan lainnya, khususnya dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Skenario yang ada dalam PPD selalu diarahkan pada penciptaan kondisi dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk

melakukan pilihan-pilihan secara bebas dan mandiri sesuai dengan potensi dan karakteristik yang mereka miliki.

Dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD), upaya memperkuat faktor pendidikan ini dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan pola pikir yang rasional, mendorong kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga dapat tertanam benih-benih **“Modernisasi”** dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian PPD akan menjadi wahana socio-cultural learning bagi masyarakat.

Dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) upaya memperkuat penguasaan masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan akses modal. Sebab bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, beberapa sumber kemajuan ekonomi diatas masih merupakan barang langka dan merupakan kendala utama bagi keberdayaan mereka. Kecilnya modal, rendahnya penguasaan teknologi, sempitnya peluang dan kesempatan kerja, terbatasnya pengembangan sumber daya manusia dan tidak dikuasainya akses pasar, sering menjadi penyebab utama ketergantungan dan ketertinggalan masyarakat lapisan bawah. Padahal berbagai faktor tersebut merupakan prasyarat keberdayaan yang mutlak diperlukan.

Upaya pengembangan potensi dan sumber daya masyarakat agar dapat bersaing secara adil dan tanpa ketergantungan, harus disertai dengan pemberian

perlindungan dengan pemihakan terhadap mereka yang lebih lemah. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hukum rimba, dimana yang kuat akan selalu menang dan yang lemah selalu kalah, yang mengakibatkan pola hubungan antar kelompok yang tidak setara dan tidak adil di masyarakat. Pemberian perlindungan (proteksi) ini dimaksudkan agar mereka yang lemah itu tidak semakin lemah, tetapi justru mampu bersaing secara seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju dengan yang belum berkembang.

2.8.1 Penanggulangan Kemiskinan Melalui PPD

Salah satu agenda utama Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004 adalah menyelesaikan masalah rendahnya kesejahteraan rakyat.

Menurut Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, prioritas Program Pembangunan Nasional diarahkan pada upaya-upaya :

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat,
- b. Merangsang pertumbuhan usaha kecil, menengah dan koperasi,
- c. Penciptaan stabilitas ekonomi dan moneter,
- d. Peningkatan daya saing,
- e. Peningkatan investasi,
- f. Penyediaan prasarana untuk mendukung pengembangan ekonomi,
- g. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari upaya-upaya yang dilakukan ini diharapkan masyarakat terus di stimulasi dan dikuatkan untuk dapat mengorganisir diri, termasuk menentukan sendiri kegiatan pembangunan daerahnya secara musyawarah sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaannya tetap mengacu kepada azas : Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat (DOUM).

Dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi maka perlu dikembangkan sebagai media untuk membangun kesadaran masyarakat dan semua pihak terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan. Program Pemberdayaan Desa/Kelurahan (PPD) merupakan media pembelajaran dan pengembangan kemampuan para pelaku pembangunan, serta media mewujudkan masyarakat sebagai penggagas dalam sebuah kegiatan pembangunan. Pengembangan konsep PPD ini juga diarahkan kepada penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance). Beberapa proses dan kegiatan yang dilaksanakan dalam PPD selalu mempertimbangkan agar dapat mendukung pencapaian pemerintahan yang baik.

Seluruh proses kegiatan dalam PPD pada hakekatnya memiliki tiga dimensi, yaitu:

- a. Memberikan wewenang dan kepercayaan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri kebutuhannya, merencanakan dan mengambil keputusan secara terbuka dan penuh tanggung jawab,

- b. Menyediakan dukungan lingkungan yang kondusif untuk mewujudkan peran masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan mereka sendiri,
- c. Menyediakan Dana Usaha Desa untuk mendanai kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Hal ini diperkuat dengan komitmen untuk mengentaskan kemiskinan dan mempercepat pemecahan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui :

- a. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan, yang diperkuat dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002.
- b. Keputusan Gubernur Nomor 592/IX/2004 Tentang Pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Propinsi Riau.

Program Pemberdayaan Desa akan dilaksanakan selama 5 (Lima) tahun pada setiap desa/kelurahan, dengan pola sebagai berikut :

- a. Masa Pembinaan.

Masa pembinaan dilakukan dengan pola pendampingan selama 3 (Tiga) tahun, pada masa ini dilakukan kegiatan berupa penyediaan Dana Usaha Desa/ Kelurahan, pelatihan, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, peningkatan partisipasi

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan.

b. Masa Transisi

Masa transisi dilakukan selama 2 (Dua) tahun untuk mencapai UED-SP Mandiri sebagai cikal bakal BUM-Des. Proses pembinaan dan monitoring tetap dilakukan secara berkala oleh Fasilitator Program dan Tim Koordinasi Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Pada tahap ini dibangun kemandirian kelembagaan UED/K-SP dan kelembagaan desa lainnya.

2.8.2 Visi dan Misi PPD :

Visi PPD adalah mewujudkan masyarakat riau yang sejahtera dan mandiri sesuai dengan Visi Riau 2020.

Adapun misi PPD adalah:

- a. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan,
- b. Memperkuat kelembagaan masyarakat desa,
- c. Mendorong pelebagaan sistem pembangunan partisipatif,
- d. Mendorong peran aktif dinas sektoral untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan Program PPD adalah :

Tujuan Program Pemberdayaan Desa adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Desa/Kelurahan menuju kemandirian desa.

Program Pemberdayaan Desa menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui a. Perluasan kesempatan dan peluang bagi orang miskin dalam kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk :

1. Penciptaan iklim pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin,
2. Penciptaan lapangan kerja,
3. Penyediaan bantuan permodalan yang berpihak kepada masyarakat miskin.
4. Penguatan peran aparat pemerintah desa/kelurahan.
5. Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk
6. Penguatan kelembagaan masyarakat desa/kelurahan,
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan desa/kelurahan,
8. desa/kelurahan secara terencana dan berkelanjutan,
9. Penguatan kapasitas kelompok dan anggota usaha kecil dan menengah.

2.8.3 Strategi Yang Dilakukan Pada Program Pemberdayaan Desa (PPD)

Dalam mewujudkan visi dan misi program maka strategi yang digunakan adalah;

- a. Pemberdayaan Masyarakat.
- b. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat.
- c. Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam mendukung strategi tersebut adalah :

- a. Pemihakan kepada kelompok masyarakat miskin dan marjinal,
- b. Otonomi dan desentralisasi, dimana masyarakat mendapatkan kesempatan, kepercayaan dan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola kegiatan pembangunan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pemanfaatan serta pelestarian dan pengembangannya,
- c. Partisipatif, dimana masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan kegiatan,
- d. Mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal seoptimal mungkin,
- e. Keterpaduan pelaksanaan kegiatan, memiliki sinergi yang kuat dengan kegiatan yang lain dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan,

Untuk mendukung tercapainya tujuan program maka dalam pelaksanaannya harus sejalan dengan prinsip-prinsip dibawah ini :

- a. Keberpihakan Kepada Orang Miskin

Setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kegiatan, harus mempertimbangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kelompok orang miskin (bermanfaat lebih banyak bagi kelompok orang miskin).

b. Transparansi

Seluruh operasional kegiatan PPD harus dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Dengan transparansi atau keterbukaan maka segala sesuatu yang dilakukan akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (accountable).

Dengan keterbukaan memudahkan masyarakat dalam :

1. Memperoleh informasi secara lengkap dan terus menerus tentang segala sesuatu yang menyangkut PPD,
2. Menumbuhkembangkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan,
3. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan PPD,
4. Meningkatkan saling percaya di antara sesama pelaku PPD.

c. Partisipasi

Pengertian partisipasi dalam PPD adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif terutama kelompok miskin dalam setiap tahap kegiatan PPD, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan

d. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola pembangunan secara mandiri dan partisipatif.

Bentuk wewenang dan tanggungjawab masyarakat dalam PPD adalah :

1. Memanfaatkan dan mengelola Dana Usaha Desa/Kelurahan,
2. Memperoleh hak pendampingan,
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhannya,
4. Mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Usaha Desa/Kelurahan,
5. Memelihara dan melestarikan serta mengembangkan kegiatan yang telah dilaksanakan,

e. Kompetisi Sehat

Setiap pengambilan keputusan penting dalam PPD dilakukan melalui musyawarah dan bersifat kompetisi secara sehat untuk menentukan prioritas kegiatan yang didanai, berdasarkan hasil kajian atau telaah terhadap berbagai alternatif pilihan untuk mendapatkan pilihan terbaik.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pengambilan keputusan dengan prinsip kompetisi sehat yaitu :

- a. Mengutamakan alternatif atau pilihan terbaik terhadap sesuatu yang diputuskan berdasarkan kebutuhan dan atau persoalan yang ada di masyarakat

- b. Menghindari setiap upaya dominasi dari individu tertentu demi kepentingan pribadi dan atau kelompok
- c. Mengutamakan keterlibatan masyarakat pada musyawarah mufakat dalam pembuatan keputusan

Unsur aparat dan Pendamping Desa/Fasilitator Program hanya bertindak sebagai fasilitator dalam setiap pengambilan keputusan di masyarakat

2.9 UED-SP PANCER JAYA

UED-SP PANCER JAYA bertujuan untuk melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa pantaicermin, yang bergerak dalam sector ekonomi desa dalam bidang simpan pinjam.

2.10 Keanggotaan UED-SP PANCER JAYA

Keanggotaan UED-SP PANCER JAYA adalah sebagai berikut :

1. UED-SP PANCER JAYA didirikan atas musyawarah desa
2. Setiap anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Pantaicermin berkesempatan untuk menjadi anggota UED-SP PANCER JAYA apabila telah memenuhi persyaratan sebagai anggota UED.SP PANCER JAYA
3. Persyaratan menjadi anggota UED-SP PANCER JAYA adalah masyarakat desa dan telah membayar simpanan pokok (simpo)

4. Besar simpanan pokok anggota UED-SP PANCER JAYA adalah Rp.50.000,-
(lima puluh ribuan rupiah)
5. Setiap buku dicatat dalam buku daftar anggota UED-SP PANCER JAYA yang ditanda tangani oleh ketua UED-SP PANCER JAYA dan diberi nomor urut
6. Setiap anggota UED-SP PANCER JAYA desa Pantaicermin bersedia mengikuti asuransi yang telah ditentukan oleh program pemberdayaan desa (PPD) di tingkat kabupaten dan provinsi
7. Besar pembiayaan asuransi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh program pemberdayaan desa ditingkat kabupaten dan provinsi

2.11 Organisasi dan Pengelolaan UED-SP PANCER JAYA

Dalam Organisasi dan Pengelolaan UED-SP PANCER JAYA adalah sebagai berikut :

1. Usaha ekonomi desa simpan pinjam UED-SP PANCER JAYA adalah suatu lembaga keuangan mikro yang bergerak dibidangnya simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan serta dikelola masyarakat desa
2. UED-SP PANCER JAYA dikelola empat orang pengelola yang terdiri dari Ketua,Kasir,Tata Usaha,staff Analisa Kredit
3. Pengelola dalam melaksanakan kegiatannya didukung oleh para pelaku PPD tingkat desa antara lain :

- a. Otoritas yang terdiri dari kepala desa, LPM, dan satu orang tokoh perempuan
 - b. Kader Pembangunan Masyarakat (KPM) yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan
 - c. Satu orang pengawas umum yang diambil dari ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Pengelola ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan melalui forum musyawarah desa dan ditetapkan melalui keputusan desa kemudian disahkan oleh bupati Kampar
5. Masa kerja pengelola UED-SP PANCER JAYA diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga maksimal tiga tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali sesuai dengan ketentuan pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan desa
6. Pengelola dapat diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir apabila melakukan penyelewengan dengan hal-hal lain yang dapat merugikan UED-SP PANCER JAYA sesuai dengan ketentuan pedoman umum dan petunjuk teknis program pemberdayaan desa

2.12 Kegiatan UED-SP PANCER JAYA

Kegiatan UED-SP PANCER JAYA meliputi:

1. Memberikan pinjaman uang untuk kegiatan usaha masyarakat desa Pantaicermin yang dinilai produktif
2. Menerima simpanan uang dari masyarakat desa sebagai anggota UED-SP PANCER JAYA dalam kaitan usahanya
3. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga perbankan/perkreditan lainnya dalam pelaksanaan simpan pinjam

2.13 Pendapatan UED-SP PANCER JAYA

Pendapatan UED-SP PANCER JAYA sebagai berikut :

1. Pendapatan UED-SP PANCER JAYA Desa pantaicermin berasal dari bunga/jasa pinjaman anggota UED-SP PANCER JAYA kepada UED-SP PANCER JAYA dengan jasa pinjman sebesar 15% / tahun atau sebesar 1,25% / bulan di kurangi sebesar 4% / tahun sebagai jasa pinjaman UED-SP PANCER JAYA kepada dana usaha desa (DUD)
2. Pendapatan UED-SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin dapat ditambah dengan hasil pendapatan dari denda yang diberlakukan bagi penunggak dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah

2.14 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Dalam Masri Singorimbun 2005:33)

2.15 Konsep Operasional

Konsep operasional ini peneliti ambil dari tujuan UED-SP yaitu :

1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja
4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa.

2.16 Variabel Penelitian

Untuk memberi suatu pemahaman, agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator serta perlunya identifikasi dan definisi terhadap variabel-variabel yang akan diteliti, sebagai berikut :

Variabel	Indikator	Sub Indikator
PERANAN UED- SP PANC ER JAYA	1. TUJUAN UED- SP PANCER JAYA	a.Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa b.Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah c. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja d.Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong- royong dan gemar menabung

		dikalangan masyarakat desa.
--	--	-----------------------------------

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor UED-SP PANCER JAYA
Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar pada tanggal 1
Februari sampai 15 April 2013

3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data pokok dalam penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang berupa :

- a. Observasi
- b. Wawancara
- c. kuisioner

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari Kantor UED-SP PANCER JAYA
Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang
sifatnya mendukung dari hasil penelitian ini :

- a. Gambaran umum mengenai Kantor UED-SP PANCER JAYA
Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

- b. Struktur UED-SP PANCER JAYA
DesaPantaicerminKecamatanTapungKabupaten Kampar
- c. KeadaandanjumlahPengelola UED-SP PANCER JAYA

3.3 PopulasidanSampel

1. Populasi

Populasiadalahwilayahgeneralisasi yang terdiriatasobyek-obyek yang mempunyaukualitasdankarakteristiktertentu yang ditetapkanolehpenelitiuntukdipelajaridankemudianditarikkesimpulannya.(*Sugiyono, 2004:90*). Adapun yang menjadiPopulasidarianalisisstrategi UED-SP PANCER JAYA adalahanggotamasyarakat yang yangberjumlahsebanyak 68 orang Pemanfaat,Pengelola UED-SP PANCER JAYA 4 orang, ketua BPD 1 orang. karenajumlahpopulasi yang kurangdariseratusmakajumlahdarisampel yang diambilharusjumlahkeseluruhanpopulasitersebut.

Untuklebihmudahdalammemahampengambilansampeldapatdilihatpada table populasidansampelsebagaiberikut :

Tabel 3.1 :Jumlah Populasi dan Sampel

N o	Sub Sam pel	Samp el	Popul asi
1	Pemanfa at	68	68
2	Pengelol ah UED -SP	1	4
3	BPD	1	1
Jumlah		73	

Sumber : Kantor UED-SP PANCER JAYA

3.4 Metode Pengumpulan Data

Ada tiga metode yang akan dipakai dalam melakukan penelitian ini :

1. Observasi merupakan peneliti langsung mengamati keadaan pada kantor UED-SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
2. Wawancara yaitu peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pengelola UED-SP PANCER JAYA dan Pengawas UED-SP PANCER JAYA (BPD)
3. Kuesioner (Angket)
yaitu Peneliti Membuat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab pada

pemanfaat UED-SP PANCER JAYA

DesaPantaicerminKecamatanTapungKabupaten Kampar

3.5 Analisa Data

Setelah data terkumpul melalui angket dan obsesvasi data tersebut diolah dengan menggunakan rumus presentase (Anas Sudjono 2004) sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Prekuensi yang sedang di cari presentasenya

F = Jumlah frekuensi

N = Angka presentase

100% = Bilangan tetap

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambar Umum Kantor UED-SP Pancer Jaya

Kantor UED-SP Pancer Jaya Terletak di Desa Pantaicermin Jl. Ahmad Bidin Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dan mulaiberdirinya UED-SP Pancer Jaya ini dibentuk berdasarkan keputusan Desa Nomor.141/KPTS/08km/2009 tanggal 29 juni 2009.

4.2 Struktur Organisasi Kantor UED-SP Pancer Jaya

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk atau susunan untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan pembagian kerja yang bertujuan untuk menghindari tugas rangkap dan semua unit dalam organisasi harus bertanggung jawab dengan konsisten pada tiap bagian pekerjaannya.

Adapun susunan organisasi Kantor UED-SP Pancer Jaya Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar terdiri dari:

1. Ketua
(Rusli Wahid, SE)
2. Tata Usaha
(Yeni Safira)
3. Kasir

(Zulfahri)

4. Staff Analisis

(Basri.Hs)

4.3 Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola UED-SP Pancer Jaya

Berikut tugas dan tanggung jawab UED-SP Pancer Jaya adalah :

1. Ketua

- a. Memimpin Organisasi UED-SP
- b. Menetapkan besarnya pinjaman yang diajukan anggota kepada UED-SP berdasarkan hasil keputusan musyawarah desa dan memenuhi syarat-syarat kelayakan usulan
- c. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pinjaman dan pengembalian pinjaman UED-SP
- d. Mengawasi perputaran modal UED-SP
- e. Mengangkat tenaga kerja Administrasi bila dibutuhkan
- f. Melaporkan posisi keuangan kepada kepala desa serta pendamping desa
- g. Melakukan koordinasi dengan aparat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Pendamping Desa, Kader Pembangunan Masyarakat Desa serta kepada pihak-pihak lain dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan dan usaha desa
- h. Membangun jaringan kerja terhadap pihak-pihak terkait
- i. Melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban setiap periode pinjaman

- j. Memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan kegiatan dan usaha desa
- k. Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening pengembalian dana usaha desa
- l. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaatan dana usaha desa

2. Kasir

- a. Menerima, menyimpan dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pembayaran yang sah
- b. melaksanakan pembukuan administrasi keuangan
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua UED-SP secara periodic dan sewaktu-waktu diperlukan
- d. Menandatangani specimen rekening UED-SP dan rekening pengembalian dana usaha desa
- e. Melakukan pembinaan administrasi keuangan kepada kelompok-kelompok pemanfaatan dana usaha desa

3. Tata Usaha

- a. Berfungsi sebagai sekretaris
- b. Membantu di bidang keuangan

- c. Melakukan penagihan terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa
- d. Membantu di bidang administrasi umum
- e. Memasang laporan keuangan dan perkembangan pinjaman dana usaha desa pada papan pengumuman secara rutin dan mutakhir
- f. Menyusun laporan rutin
- g. Melakukan pengarsipan dan dokumentasi seluruh data administrasi kegiatan dana usaha desa
- h. Melakukan pembinaan rutin terhadap kelompok-kelompok dan anggota pemanfaat dana usaha desa

4. Staf Analisis Kredit

- a. Melakukan pemeriksaan administrasi dan kelengkapan dokumen proposal dari pemanfaat dalam mengajukan pinjaman pada UED-SP
- b. Melakukan penilaian kelayakan usaha dengan melakukan kunjungan lapangan meliputi :
 - Cek fisik kelayakan usaha (tempat usaha)
 - Cek fisik kelayakan bangunan
 - Mencari informasi kepada masyarakat tentang calon peminjam (karakter calon pemanfaat)
 - Mencari informasi kepada masyarakat tentang pinjaman dengan pihak lain yang bersangkutan

- c. Mengisi formulir verifikasi usulan saat kunjungan lapangan
- d. Membuat rekomendasi awal hasil kunjungan lapangan
- e. Melakukan umpan balik pada calon peminjam
- f. Melakukan rekomendasi akhir untuk dibahas dalam musyawarah khusus yang terdiri dari otoritas DUD, kader pembangunan masyarakat, pengawas umum dan pengelola UED-SP dan pendamping Desa

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Responden

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan diolah. Penulis menyebar kuesioner sebanyak 68 responden, di mana responden merupakan pemanfaat UED-SP PANCER JAYA. Profil responden yang ditanyakan pada kuesioner adalah Nama,Usia, Jenis kelamin,Pendidikan terakhir. Data tentang profil pemanfaat akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

Untuk lebih jelas keadaan pemanfaat yang ada didesa Pantaicermin kecamatan Tapung kabupaten kampar berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. 1 : Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

N o	Jenis Kel ami n	Juml a h	Persent ase
1	Pria	41	60.29%
2	Peremp uan	27	39.70%

	Jumlah	68	100%
--	---------------	-----------	-------------

Sumber : Kantor UED-SP PANCER JAYA Kabupaten Kampar 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati bahwa perbandingan antara jumlah pemanfaat pria dengan perempuan berbeda. Dimana pria lebih mendominasi yaitu sebanyak 41 orang atau sekitar 60.29%, sedangkan perempuan sebanyak 27 orang atau sekitar 39.70% dari keseluruhan jumlah Pemanfaat

2. Tingkat Pendidikan Pemanfaat/Responden

Mengenai tingkat pendidikan pemanfaat dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 5.2 : Jumlah Tingkat Pendidikan Pemanfaat UED-SP Pancer Jaya

N o	Tingkat Pen didi kan	Jum l a h	Persent ase
1	SD	18	26.47%
2	SLTP	15	22.05%
3	SLTA/S MK	29	42.64%
4	D2	4	5.88%

.			
5	S1	2	2.94%
.			
	Jumlah	68	100%

Sumber : Kantor UED-SP PANCER JAYA Kabupaten Kampar 2013

Berdasarkan tabel diatas dapat diamati bahwa perbandingan pendidikan dapat dijelaskan tingkatan pendidikan SD sebanyak 18 orang atau sekitar 26.47% dan untuk tingkatan pendidikan SLTP sebanyak 15 orang atau sekitar 22.05% dan untuk tingkatan SLTA/SMK sebanyak 29 orang atau sekitar 42.64% sedangkan untuk tingkatan D2 sebanyak 4 orang atau sekitar 5.88% dan untuk tingkatan S1 sebanyak 2 orang atau sekitar 2.94%.

5.2 Tujuan UED-SP Pancer Jaya Desa Pantaicermin Kabupaten Kampar

Tabel 5.3Pendapat responden tentangtujuan UED-SP Pancer Jaya Untuk Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa

N o	Kata g o r i J a w a b a n	Freku en si	Persentas e(%)
1	Amat B a i	8	11,76%

	k		
2	Baik	55	80,88%
3	Cukup Baik	5	7,35%
4	Tidak Baik	0	0,00%
Jumlah		68	100%

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.3 diatas dapat dilihat mengenai pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer jaya untuk mendorong perekonomian masyarakat desa dalam memberikan jawaban Amat Baik Sebanyak 8 responden atau 11,76% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 55 responden atau 80,88%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 5 responden atau 7,35%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik tidak ada atau 0.00%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya Untuk Mendorong Perekonomian masyarakat desa yang di terapkan baik untuk dilakukan.

Tabel 5.4 Tanggapan responden Mengenai kegiatan dalam Mendorong Perekonomian Masyarakat Desa

No	Kata	Frekuensi	Persentase (%)
	g o r		

	i J a w a b a n		
1	Amat B a i k	1	1,47%
2	Baik	33	48,52%
3	Cuku p B a i k	34	50,00%
4	Tidak B a i k	0	0,00%
Jumlah		68	100%

Sumber: *data olahan tahun 2013*

Berdasarkan tabel 5.4 diatas dapat dilihat Tanggapan responden mengenai kegiatan dalam mendorong perekonomian masyarakat desa dalam memberikan jawaban Amat Baik Sebanyak 1 responden atau 1,47% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 33 responden atau 48,52%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 34 responden atau 50,00%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik tidak ada atau 0.00%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kegiatan dalam Mendorong Perekonomian masyarakat desa yang dilakukan Cukup Baik dan

dibutuhkan lagi untuk penerapan yang baik agar lebih berjalan baik perekonomian masyarakat desa tersebut.

Tabel 5.5 Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya Untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah

No	Kata g o r i J a w a b a n	Freku en si	Persentas e(%)
1	Amat B a i k	4	5,88%
2	Baik	51	75,00%
3	Cuku p B a i k	13	19,11%
4	Tidak B a i k	0	0,00%
Jumlah		68	100%

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.5 diatas dapat dilihat mengenai pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer jaya untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat

yang berpenghasilan rendah dalam memberikan jawaban Amat Baik Sebanyak 4 responden atau 5,88% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 51 responden atau 75,00%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 13 responden atau 19,11%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik tidak ada atau 0.00%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya Untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah yang di terapkan baik untuk dilakukan.

Tabel 5.6 Tanggapan responden Mengenai kegiatan Untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah

No	Kata Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
1	Amat Baik	2	2,94%
2	Baik	42	61,76%
3	Cukup Baik	23	33,82%
4	Tidak Baik	1	1,47%

	k		
Jumlah		68	100%

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.6 diatas dapat dilihat Tanggapan responden mengenai kegiatan untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memberikan jawaban Amat Baik Sebanyak 2 responden atau 2,94% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 42 responden atau 61,76%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 23 responden atau 33,82%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik Sebanyak 1 responden atau 1.47%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kegiatan Untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dilakukan berjalan dengan Baik.

Tabel 5.7Pendapat responden tentangtujuan UED-SP Pancer Jaya Dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja

N o	Kata g o r i J a w a b a n	Freku en si	Persentas e(%)
1	Amat B a i k	6	8,82%
2	Baik	51	75,00%
3	Cuku	9	13,23%

	p B a i k		
4	Tidak B a i k	2	2,94%
Jumlah		68	100%

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.7 diatas dapat dilihat mengenai pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer jaya Dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerjadalam memberikan jawaban Amat Baik Sebanyak 6 responden atau 8,82% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 51 responden atau 75,00%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 9 responden atau 13,23%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik sebanyak 2 responden atau 2.94%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya Dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerjayang di terapkan baik untuk dilakukan.

Tabel 5.8Tanggapan responden Mengenai kegiatan Untuk mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja

N o	Kata g o r i J a	Freku en si	Persentas e(%)
----------------	-------------------------------------------------	----------------------------	---------------------------

	w a b a n		
1	Amat B a i k	0	0,00%
2	Baik	48	70,58%
3	Cuku p B a i k	20	29,41%
4	Tidak B a i k	0	0,00%
Jumlah		68	100%

Sumber: *data olahan tahun 2013*

Berdasarkan tabel 5.8 diatas dapat dilihat Tanggapan responden mengenai kegiatan Untuk mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja dalam memberikan jawaban Amat Baik tidak ada atau 0,00% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 48 responden atau 70,58%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 20 responden atau 29,41%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik tidak ada atau 0.00%

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kegiatan Untuk mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja yang dilakukan berjalan dengan Baik.

Tabel 5.9 Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa

N o	Kata g o r i J a w a b a n	Freku en si	Persentas e(%)
1	Amat B a i k	4	5,88%
2	Baik	42	61,76%
3	Cuku p B a i k	22	32,35%
4	Tidak B a i k	0	0,00%
Jumlah		68	100%

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.9 diatas dapat dilihat mengenai pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer jaya untuk memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa dalam memberikan jawaban Amat Baik Sebanyak 4 responden atau 5,88% dan yang

memberikan jawaban Baik sebanyak 42 responden atau 61,76%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 22 responden atau 32,35%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik tidak ada atau 0.00%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa yang di terapkan baik untuk dilakukan.

Tabel 5.10 Tanggapan responden Mengenai kegiatan untuk pemeliharaan dan peningkatan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase(%)
1	Amat Baik	1	1,47%
2	Baik	44	64,70%
3	Cukup Baik	21	30,88%
4	Tidak Baik	2	2,94%

	i k		
Jumlah		68	100%

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan tabel 5.10 diatas dapat dilihat Tanggapan responden mengenai kegiatan untuk pemeliharaan dan peningkatan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa dalam memberikan jawaban Amat Baik sebanyak 1 responden atau 1,47% dan yang memberikan jawaban Baik sebanyak 44 responden atau 64,70%, yang memberikan jawaban Cukup Baik sebanyak 21 responden atau 30,88%, dan yang memberikan jawaban Tidak Baik sebanyak 2 responden atau 2.94%.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tanggapan responden mengenai kegiatan untuk pemeliharaan dan peningkatan kebiasaan hidup bergotong royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat desa yang dilakukan berjalan dengan Baik.

Tabel 5.11 Rekapitulasi jawaban responden dari indikator tujuan UED-SP Pancer Jaya

No	Pertanyaan	Katagori jawaban				Jumlah
		A n a t B a i k	B a i k 5	C u k u p B a i k	T i d a k B a i k	
1	Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa	8	5	5	0	68
2	Tanggapan responden	1	3	3	0	6

	kegiatan dalam mendorong perekonomian masyarakat desa		3	4		8
3	Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah	4	5 1	1 3	0	6 8
4	Tanggapan responden kegiatan untuk peningkatan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah	2	4 2	2 3	1	6 8
5	Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja	6	5 1	9	2	6 8
6	Tanggapan responden kegiatan dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja	0	4 8	2 0	0	6 8
7	Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat	4	4 2	2 2	0	6 8
8	Tanggapan responden kegiatan dalam pemeliharaan dan peningkatan kebiasaan hidup	1	4 4	2 1	2	6 8

	bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat					
Jumlah Rata-Rata		3	4 6	1 8	1	6 8
Persentase		4 ,4 1 %	6 7 ,6 4 %	2 6 ,4 7	1 ,4 7 %	1 0 0 %

Sumber: data olahan tahun 2013

Berdasarkan Tabel 5.11 diatas dapat dilihat bahwa rekapitulasi pendapat dan tanggapan responden mengenai tujuan UED-SP Pancer Jaya, baik itu mengenai Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat desa, Tanggapan responden kegiatan dalam mendorong perekonomian masyarakat desa, Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk meningkatkan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah, Tanggapan responden kegiatan untuk peningkatan jiwa wirausaha masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja, Tanggapan responden kegiatan dalam mendorong usaha informal untuk penyerapan tenaga kerja, Pendapat responden tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya untuk memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat, Tanggapan responden kegiatan dalam pemeliharaan dan peningkatan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung dikalangan masyarakat Dinilai sudah baik dan efektif jumlah presentase **67,64%**.

Dan berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rusli Wahit,SE selaku ketua UED-SP Pancer Jaya.

“bahwa tujuan dari UED-SP Pancer Jaya Alhamdulillah dapat terlaksana dan berjalan dengan baik itu semua tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa untuk melaksanakan tujuan dari UED-SP Pancer Jaya ini”.(hasil wawancara 25 Agustus 2013).

Dan wawancara kepada Bapak Nur Baiyus,Spdi selaku pengawas UED-SP Pancer Jaya Kutipannya sebagai berikut :

“tujuan dari UED-SP Pancer Jaya sampai saat sekarang ini cukup signifikan perkembangannya karena pengelola yang tahu akan pedoman-pedoman dari tujuan UED-SP ini, dan itu semua tidak lepas partisipasi masyarakat yang selalu mendukung dan saya selaku pengawas dari UED-SP selalu memantau dan mengawasi akan perkembangan UED-SP Pancer Jaya ini, agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan UED-SP Pancer Jaya”.(hasil wawancara 28 Agustus 2013).

Juga berdasarkan wawancara peneliti lakukan kepada salah satu pemanfaat tentang tujuan UED-SP Pancer Jaya ini berikut kutipannya :

“tujuan dari UED-SP ini sangat positif untuk dilaksanakan, karena dapat mendorong perekonomian masyarakat, kami selaku masyarakat sangat mendukung terhadap pengelola UED-SP Pancer Jaya untuk menjalankan tujuan dari UED-SP tersebut”.(hasil wawancara 31 Agustus 2013)

Dan berdasarkan analisis penulis bahwa wawancara yang telah dilakukan Kepada Ketua UED-SP Bapak Rusli Wahid,SE dan kepada pengawas dari UED-SP Bapak Nur Baiyus,Spdi maupun kepada salah satu Pemanfaat dapat penulis analisa bahwa strategi yang diterapkan pengelola UED-SP Pancer Jaya adalah dengan merumuskan tujuan UED-SP sesuai dengan kebutuhan Masyarakat/Pemanfaat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan lapangan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peran dan diterapkan oleh pengelola UED-SP Pancer Jaya Pada Program Pemberdayaan Desa UED- SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec. Tapung Kab. Kampar dengan merumuskan tujuan UED-SP yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu :

1. Untuk mendorong kegiatan prekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan jiwa berusaha masyarakat yang berpenghasilan rendah
3. Mendorong usaha sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja
4. Memelihara dan meningkatkan kebiasaan hidup bergotong-royong dan gemar menabung di kalangan masyarakat desa.

Diketahui bahwa tanggapan responden terhadap peran dan diterapkan oleh pengelola UED-SP Pancer Jaya Pada Program Pemberdayaan Desa UED- SP PANCER JAYA Desa Pantaicermin Kec. Tapung Kab.

Kampar dinilai sudah baik dan efektif jumlah presentase 67,64%.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai masukan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Hendaknya peranan UED-SP PANCER JAYA yang telah dilakukan tetap dipertahankan dan ditingkatkan agar bisa bertambah lebih baik.
2. Partisipasi masyarakat harus lebih ditingkatkan untuk kemajuan UED-SP Pancer Jaya untuk kedepannya.
3. Dapat dijadikan contoh kepada UED-SP lainya agar bisa perkembangan UED-SP yang ada di Indonesia bisa membantu perekonomian masyarakat

Daftar Pustaka

- Administratif dan Operasional. Jakarta: PT Bumi Aksara. Dessler, Gary.
- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, S. *Metode Research : Penelitian Ilmiah* Jakarta : Bumi Aksara, 2004
- Malo, M, dkk, 1986, *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka, Jakarta: Erlangga
- Sianipar J.P.G, *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, LAN-RI, Jakarta, 1999.
- Siagian. SP, *Administrasi Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2004
- Singarimbun, *Metodelogi Penelitian Survey*, Jakarta ; LP3E5. 2005
- Hasan, Hamid. 2008. *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oktareza, Frans Dwi. 2011. *Pengertian Evaluasi BK*. Diunduh dari <http://www.pengertiandefinisi.com/2012/13/pengertianevaluasi.html> pada tanggal 9 April 2013.
- W. Gulo, 2004, *Metodologi Penelitian*, cetakan ketiga, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Koho Riwu. J, 1989, *Ilmu Sosial Dasar*, Yogyakarta: Usaha Nasional
- Soetrisno Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta: Kanisius
- Raharjo, 2004, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Edi Suharto, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

Dokumentasi Desa 2010